

**PENGARUH INDEKS PERSEPSI KORUPSI,
PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENERIMAAN
PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
ASEAN-5 TAHUN 2002-2011**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Rino Bagus Haryanto
0910212024**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2013**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

PENGARUH INDEKS PERSEPSI KORUPSI, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENERIMAAN PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI ASEAN-5 TAHUN 2002-2011

Yang disusun oleh :

Nama : Rino Bagus Haryanto

NIM : 0910212024

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 23 Januari 2013.

Malang, Januari 2013
Dosen Pembimbing,

Dr. Sasongko, SE., MS.
NIP. 19530406 198003 1 004

**PENGARUH INDEKS PERSEPSI KORUPSI, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN
PENERIMAAN PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI ASEAN-5
TAHUN 2002-2011**

Rino Bagus Haryanto
Sasongko
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email : rinofreak@yahoo.com

ABSTRACT

This paper is based on the empirical evidence on the effects of corruption on economic growth. There are two different opinions, some have argued that corruption can reduce economic growth and others argue corruption can increase economic growth. Based on empirical evidence to the contrary in various objects of research, the authors try to review and analyze how the effects of corruption on economic growth in ASEAN-5 countries consisting of Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and the Philippines. ASEAN-5 is a region that describes the emerging economies. This paper uses panel data analysis of five countries during the period of 2002-2011.

Keywords: Corruptions, ASEAN-5, Corruption Perceptions Index, Growth, Rent-seeking.

ABSTRAK

Tulisan ini didasarkan sebuah bukti empiris tentang pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Terdapat dua pendapat besar yang saling bertolak belakang, ada yang mengatakan bahwa korupsi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi dan ada yang mengatakan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan bukti empiris yang bertolak belakang di berbagai objek penelitian tersebut, penulis mencoba mengulas dan menganalisis bagaimana pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan dalam kawasan ASEAN-5 yang terdiri dari negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina, ASEAN-5 merupakan sebuah kawasan regional yang menggambarkan negara sedang mengalami perkembangan ekonomi. Analisis menggunakan data panel lima negara periode sepuluh tahun dari tahun 2002-2011.

Kata kunci: Korupsi, ASEAN-5, Indeks Persepsi Korupsi, Pertumbuhan, Perburuan ente.

A. LATAR BELAKANG

Pendekatan ekonomi tentang pertumbuhan mengalami keterbatasan, sebab ekonomi tidak saja dipengaruhi oleh beberapa hal yang sering dibicarakan seperti investasi, pengeluaran pemerintah dan net ekspor. Kenyataannya banyak variabel lain yang mempengaruhi pendapatan nasional. Seiring dengan perkembangan ekonomi politik, pendekatan politik pun dipakai dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi. Korupsi merupakan sebuah penyalahgunaan dari kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Korupsi telah menjadi isu dalam ilmu politik dan ilmu sosial dalam beberapa abad terakhir, namun masih sulit untuk menemukan pendekatan yang sistematis berdasarkan sains (Lambsdorff, 2007).

Terdapat dua pendapat besar yang saling bertolak belakang antara hubungan korupsi dengan pertumbuhan ekonomi. Pendapat pertama menyatakan korupsi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pendapat lain yang bertolak belakang yaitu korupsi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

ASEAN-5 yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina merupakan sebuah gambaran kawasan perekonomian yang sedang berkembang. Oleh karena itu dianggap perlu untuk melihat bagaimana pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN-5.

B. TELAAH PUSTAKA

Pertumbuhan

Kinerja teori neoklasik yang tidak memuaskan dalam menjelaskan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang telah menyebabkan kekecewaan yang meluas terhadap teori pertumbuhan tradisional. Menurut teori tradisional tidak terdapat karakteristik intrinsik dari perekonomian yang dapat menyebabkannya tumbuh dalam jangka panjang. Teori pertumbuhan endogen berusaha menjelaskan faktor-faktor yang menentukan besaran tingkat pertumbuhan yang tidak dijelaskan dan dianggap sebagai variabel eksogen dalam perhitungan teori pertumbuhan neoklasik Solow (Todaro dan Smith, 2006).

Teori pertumbuhan endogen yang dikemukakan oleh Romer merupakan awal dari kebangkitan teori pertumbuhan baru yang memasukkan variabel eksogen diluar variabel menurut neoklasik. Korupsi merupakan variabel yang sifatnya eksogen dari pertumbuhan.

Peran Pemerintah

Peran pemerintah secara garis besar dalam perekonomian dibagi menjadi dua cara yaitu dengan kebijakan fiskal dan moneter. Pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan salah satu contoh dari peran pemerintah melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merujuk pada pilihan-pilihan pemerintah mengenai tingkat pembelanjaan dan pajak pemerintah secara keseluruhan (Mankiw, 2006:337). Ketika pemerintah mengubah tingkat pembelanjaan berbagai barang dan jasa, maka kurva permintaan agregat langsung bergeser. Sebagai contoh ketika pemerintah melakukan pembelian barang di perusahaan dalam negeri maka pembelian tersebut akan meningkatkan permintaan barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Karena pengeluaran dilakukan dalam perusahaan dalam negeri maka kenaikan permintaan perusahaan tersebut muncul sebagai peningkatan agregat barang dan jasa secara keseluruhan sehingga menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Pergeseran kurva permintaan agregat ke kanan tidak serta-merta sebesar pengeluaran pemerintah untuk melakukan pembelian di perusahaan, namun dapat lebih besar dari apa yang dikeluarkan pemerintah. Hal tersebut dinamakan efek pengganda atau *multiplier effect* (Mankiw, 2006:338).

Korupsi

Korupsi secara umum didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi di sini adalah menerima uang atau aset berharga, dan peningkatan kekuasaan atau status. Menerima janji untuk keuntungan masa depan atau keuntungan relasi juga merupakan keuntungan pribadi yang biasa disebut sebagai nepotisme dan favoritisme (Lambsdorff, 2007). Kekuasaan publik dilaksanakan oleh birokrat dalam berbagai sektor seperti pengadilan, pengadaan, peraturan bisnis, pemberian izin, privatisasi, valas (termasuk bea cukai, izin perdagangan dan transaksi keuangan internasional), pajak (termasuk pemberian pengecualian pajak, kebijakan, subsidi, sarana publik seperti air, listrik, telepon, kesehatan dan pendidikan). Penyalahgunaan dapat berhubungan dengan perilaku menyimpang dari tugas yang seharusnya dijalankan, di mana kepentingan golongan diutamakan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas (Lambsdorff, 2007).

Korupsi dapat dipahami sebagai bentuk perlakuan istimewa oleh pengambil keputusan. Perlakuan tersebut mengundang pihak swasta untuk mencoba mendapatkan keuntungan dari sewa ekonomi yang dihasilkan dan bersaing satu sama lain dengan membayar suap. Jika dibandingkan dengan lobi, korupsi biasanya digambarkan sebagai rent seeking yang bersifat monopoli, rent seeking disebut korupsi saat kompetisi untuk hak istimewa terbatas pada beberapa orang dan pengeluaran rent seeking sangat berharga bagi penerima (Lambsdorff, 2002).

Dalam menganalisa korupsi, terdapat beberapa pendekatan diantaranya adalah pendekatan *rent seeking* tradisional. Korupsi menurut pendekatan *rent seeking* tradisional adalah mengenai distribusi keuntungan dan bukan berkaitan dengan efisiensi ekonomi. Tullock (1967) berpendapat bahwa pajak dan tarif menggeser bagian dari konsumen kepada negara sebagai biaya administrasi. Biaya transaksi

ini timbul dalam bentuk gaji inspektur pajak atau petugas bea cukai serta biaya publik lainnya berkenaan penyelundupan dan penggelapan pajak. Hal yang sama muncul dalam kasus bantuan dan subsidi. Penerima subsidi dapat berinvestasi dengan berpura-pura tidak mampu untuk meningkatkan posisi potensial mereka sebagai penerima bantuan. Namun hal ini dapat merusak kesejahteraan secara keseluruhan (Lambsdorff, 2007:111).

Penelitian Terdahulu

Penelitian Mauro (1997) menunjukkan bahwa korupsi memberikan konsekuensi antara pertama, melemahkan investasi dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi berkurang. Kedua, terjadinya *talent miss allocated*. Artinya korupsi menempatkan orang bukan pada tempatnya. Ketiga, Aliran pinjaman dan hibah dari luar negeri mengalami misalokasi. Fenomena ini biasanya terjadi pada negara-negara berkembang yang sangat mengandalkan utang dan bantuan luar negeri. Keempat, melemahnya penerimaan pemerintah dari pajak, sehingga akan mempengaruhi komposisi pengeluaran pemerintah. Hal ini akan berdampak terhadap semakin tidak baiknya penyediaan barang dan jasa publik (baik kuantitas dan kualitas).

Tanzi dan Davodi (1997) menunjukkan bahwa berkurangnya tingkat korupsi akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan Gupta (1998) menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara korupsi dengan pertumbuhan ekonomi, dan bukan karena disebabkan oleh bias simultan. Penelitian Gupta (1998) menghilangkan ukuran-ukuran kemiskinan dalam pembangunan, karena keterbatasan data penelitian.

Swaleheen dan Stansel (2007) di dalam penelitiannya yang berjudul “*Economic Freedom, Corruption and Growth*”, mengestimasi 60 negara dengan menggunakan metode panel data. Hasil yang didapat oleh Swaleheen adalah bahwa korupsi dapat menurunkan pertumbuhan ketika pelaku ekonomi memiliki pilihan yang sedikit (kebebasan ekonomi yang rendah). Tetapi jika orang menghadapi banyak pilihan atau kebebasan ekonomi tinggi, korupsi membantu pertumbuhan dengan menyediakan jalan di sekitar kontrol pemerintah.

C. METODE PENELITIAN

Untuk menguji data pada penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Teknik yang digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel ada tiga (3) yaitu Common Effect (CEM), Fixed Effect (FEM), dan Random Effect (REM) (Ajijja, 2011).

Dalam menganalisa pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN-5 kami menggunakan metode analisis data panel dengan struktur model sebagai berikut.

$$GROWTH_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 COR_{it} + \beta_2 GOV_{it} + \beta_3 TAX_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Di mana :

- $GROWTH_{it}$: Pertumbuhan GDP
- COR_{it} : Indeks Persepsi Korupsi
- GOV_{it} : Total pengeluaran konsumsi pemerintah (% GDP)
- TAX_{it} : Total penerimaan pajak (% GDP)
- ε_{it} : *error term*

GROWTH dan COR pada model tersebut sebagai variabel utama, sedangkan lainnya merupakan variabel kontrol dengan definisi operasional sebagai berikut.

GROWTH merupakan pertumbuhan GDP yang didapatkan dari perubahan GDP negara-negara ASEAN-5 tahun sekarang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk mengukur variabel pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini, penulis menggunakan pertumbuhan GDP (%) dengan *proxy* GDP harga konstan tahun 2000. GDP harga konstan adalah jumlah dari nilai tambah bruto oleh semua produsen penduduk dalam perekonomian ditambah pajak produk dan dikurangi subsidi yang

tidak termasuk dalam nilai produk. Variabel ini menggunakan satuan Dollar Amerika Serikat. Data GROWTH didapat dari *World Bank*.

COR merupakan korupsi yang terjadi pada ASEAN-5. Data menggunakan variabel indeks persepsi korupsi (Knack and Keefer, 1995 dalam Svensson, 2000). Indeks persepsi korupsi didapat dari *Transparency International*. Di mana indeks 10 untuk tidak terjadi korupsi sama sekali dan 0 untuk terjadi korupsi di mana-mana.

TAX merupakan total penerimaan pajak pada negara-negara ASEAN-5. Variabel ini menggunakan persentase besarnya keseluruhan penerimaan pajak terhadap PDB (%).Data TAX didapat dari *World Bank*.

Data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah data lima negara di ASEAN-5 selama periode 10 tahun dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2011. Teknik yang digunakan adalah data panel dengan pemilihan penggunaan metode *common, fixed effect* ataupun *random effect*. Pemilihan model data panel menggunakan dua uji yaitu uji chow dan uji hausman (Ajija, 2011).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil Uji Chow dan Uji Hausman dihasilkan bahwa metode yang lebih baik digunakan adalah pendekatan *fixed effect*. Setelah mengestimasi dengan metode *fixed effect* dilakukan maka didapat tentang pengaruh variabel COR, GOV dan TAX terhadap variabel GROWTH dapat dilihat melalui persamaan yang terambil dari hasil estimasi adalah sebagai berikut.

Tabel 1: Tabel determinan *GROWTH*

Variable	Coefficient	Prob.
Konstanta	7.220136 (0.914114)	0.3677
COR	3.467677 (2.641922)	0.0128**
GOV	-0.996050 (-2.164674)	0.0382**
TAX	-0.472683 (-1.217070)	0.2328
R^2	0.751934	
F-statistic	5.872918	
Prob(F-statistic)	0.000013	

*signifikan pada $\alpha = 1\%$ **signifikan pada $\alpha = 5\%$ ***signifikan pada $\alpha = 10\%$

Sumber: data primer (diolah), 2012

Dari hasil tersebut di atas didapati persamaan model sebagai berikut.

$$GROWTH = 7.220136 + 3.467677COR - 0.996050GOV - 0.472683TAX \quad (2)$$

Di mana :

GROWTH : Pertumbuhan GDP

COR : Indeks Persepsi Korupsi

GOV : Total pengeluaran konsumsi pemerintah (% GDP)

TAX : Total penerimaan pajak (% GDP)

Dari persamaan di atas, didapati bahwa indeks persepsi korupsi (COR) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan, pengeluaran pemerintah (GOV) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan, penerimaan pajak (TAX) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan. Pada saat variabel COR, GOV dan TAX bernilai nol maka pertumbuhan adalah sebesar 7.220136. Kenaikan satu unit indeks persepsi korupsi akan menaikkan pertumbuhan sebesar 3.467677. Kenaikan satu persen pengeluaran pemerintah akan menurunkan pertumbuhan sebesar 0.996050.

Dari hasil estimasi terdapat dua variabel yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel tersebut adalah COR dan GOV dengan nilai *t*-statistik sebesar 2.641922 dan -2.164674. Berdasarkan hasil tersebut dapat kita ambil dua kesimpulan sementara. Yang pertama adalah bahwa variabel korupsi (COR) secara signifikan positif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti ketika terjadi kenaikan variabel indeks persepsi korupsi, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan. Dalam kata lain semakin rendah sebuah negara dalam kegiatan korupsi, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Kesimpulan kedua yang dapat diambil adalah bahwa variabel pengeluaran pemerintah (GOV) signifikan negatif terhadap pertumbuhan. Hal ini berarti ketika terjadi kenaikan variabel pengeluaran pemerintah (GOV), maka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan.

R^2 dalam model ini didapat adalah sebesar 0.751934 artinya sebesar 75% variabel bebas mampu menjelaskan model. Sedangkan *F*-statistik yang didapat didalam model ini sebesar 5.872918 dengan probabilitas sebesar 0.000013. Dengan probabilitas sebesar 0.000013 dan lebih kecil dari α sebesar 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama sama variabel bebas (korupsi, konsumsi pemerintah, penerimaan pajak, dan kualitas regulasi) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan.

Variabel indeks persepsi korupsi secara statistik signifikan dalam menjelaskan variabel terikat. Hal tersebut dapat dilihat dari *t*-statistik sebesar 2.641922 dengan probabilitas sebesar 0.0128. Karena probabilitas lebih kecil dari α sebesar 0.05. Variabel indeks persepsi korupsi juga memiliki hasil positif terhadap variabel terikat yaitu variabel pertumbuhan. Nilai positif tersebut berarti bahwa setiap kenaikan variabel indeks persepsi korupsi satu indeks maka akan menaikkan pertumbuhan sebesar 3.467677. Hal ini berarti semakin berkurangnya korupsi di sebuah negara maka tingkat pertumbuhan akan meningkat. Hal tersebut dikarenakan variabel indeks persepsi korupsi merupakan sebuah indeks angka dengan *range* 0 (nol) sampai 10 (sepuluh) di mana nilai 0 (nol) untuk terjadi korupsi parah dan nilai 10 (sepuluh) untuk bersih dari tindakan korupsi. Sehingga semakin tinggi indeks maka semakin bagus. Hal tersebut sesuai dengan harapan bahwa semakin rendah korupsi maka pertumbuhan akan meningkat. Karena korupsi sifatnya adalah mengurangi sebuah efektifitas dan efisiensi dalam perekonomian. Ketika pemerintahan berjalan dengan baik dengan tidak adanya korupsi yang terjadi maka tujuan-tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan di berbagai sektor dapat tercapai.

Variabel konsumsi pemerintah secara statistik signifikan dalam menjelaskan variabel dependen. Hal tersebut dapat dilihat dari *t*-statistik sebesar -2.164674 dengan probabilitas sebesar 0.0382. Karena probabilitas lebih kecil dari α sebesar 0.05. Variabel konsumsi pemerintah memiliki hasil negatif terhadap variabel terikat yaitu variabel pertumbuhan. Nilai negatif tersebut berarti bahwa setiap kenaikan 1% besaran konsumsi pemerintah dibandingkan dengan GDP maka akan menurunkan pertumbuhan sebesar 0.996050. Hasil yang didapat ini bertolak belakang dengan apa yang menjadi tujuan dari pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Namun kita tidak dapat memvonis hal tersebut benar. Berkurangnya pertumbuhan akibat dari pengeluaran pemerintahan bisa saja terjadi karena beberapa hal. Diantaranya adalah diakibatkan karena pengeluaran pemerintah yang berlaku di sebuah tahun, tidak secara langsung dapat dilihat dampaknya pada tahun tersebut. Karena konsumsi pemerintah terdiri dari beberapa sektor, diantaranya adalah untuk infrastruktur atau belanja modal. Sehingga dampak dari konsumsi pemerintah tersebut baru dapat dirasakan dampaknya terhadap pertumbuhan dalam jangka waktu yang tidak singkat. Dampak dari pengeluaran atau konsumsi pemerintah dapat dirasakan pada periode-periode setelah konsumsi pemerintah itu dilakukan. Kemungkinan berikutnya adalah terjadinya *crowding out effect* akibat pengeluaran pemerintah yang menurunkan investasi sehingga pendapatan nasional berkurang dan mengakibatkan pertumbuhan menurun (Furceri dan Sousa, 2009).

Variabel penerimaan pajak secara statistik tidak signifikan dalam menjelaskan variabel terikat. Hal tersebut dapat dilihat dari *t*-statistik sebesar -1.217070 dengan probabilitas sebesar 0.2328. Karena

probabilitas lebih besar dari α sebesar 0.05. Temuan variabel penerimaan pajak yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ini didapati juga oleh Ojede dan Yamarik (2012) dalam penelitian yang berjudul “*Tax policy and state economic growth: The long-run and short-run of it*”. Penelitian tersebut menggunakan menggunakan data tahunan dari 48 negara bagian Amerika Serikat dalam kurun waktu tahun 1967-2008. Ojede dan Yamarik mendapati bahwa penerimaan pajak tidak signifikan pada jangka pendek maupun jangka panjang.

Koefisien *intercept* dalam model sebesar 7.220136 menunjukkan bahwa pada saat variabel COR, GOV dan TAX bernilai nol atau dengan kata lain tidak ada perubahan pada indeks persepsi korupsi, konsumsi pemerintah, penerimaan pajak dan kualitas regulasi maka pertumbuhan adalah sebesar 7.220136. dan *intercept* masing masing *individual specific* berbeda-beda. Dapat dilihat dalam tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2: **Intercept ASEAN-5**

<i>Individual specific</i>	<i>Intercept</i>
Indonesia	11.797848
Malaysia	7.588074
Thailand	13.449434
Filipina	12.141455
Singapura	-8.876134

Sumber: data primer (diolah), 2012

Dengan persamaan pada masing-masing negara adalah sebagai berikut.

Tabel 3: **Persamaan Masing-masing Negara**

Negara	Persamaan
Indonesia	$GROWTH = 11.797848 + 3.467677COR - 0.996050GOV - 0.472683TAX$
Malaysia	$GROWTH = 7.588074 + 3.467677COR - 0.996050GOV - 0.472683TAX$
Thailand	$GROWTH = 13.449434 + 3.467677COR - 0.996050GOV - 0.472683TAX$
Filipina	$GROWTH = 12.141455 + 3.467677COR - 0.996050GOV - 0.472683TAX$
Singapura	$GROWTH = -8.876134 + 3.467677COR - 0.996050GOV - 0.472683TAX$

Sumber: data primer (diolah), 2012

Sedangkan pada *time specific* terlihat bahwa di tahun 2009 mempunyai *intercept* yang menonjol dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4: **Intercept Waktu**

Tahun	<i>Intercept</i>
2002--C	7.160573
2003--C	7.439529
2004--C	8.212041
2005--C	6.382291
2006--C	7.076981
2007--C	8.048417
2008--C	5.403415
2009--C	2.922849
2010--C	10.68032
2011--C	4.735374

Sumber: data primer (diolah), 2012

Dari hasil yang didapat dari estimasi beberapa variabel terhadap pertumbuhan, diantaranya adalah variabel korupsi, kualitas regulasi, pajak dan pengeluaran pemerintah maka dapat diambil sebuah benang merah di mana perilaku korupsi yang tinggi ditandai dengan rendahnya indeks akan

mengurangi pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan diantaranya adalah penelitian oleh Mauro (1997) di mana korupsi menurut Mauro akan menurunkan pertumbuhan. Jika dibuat secara langkah demi langkah bagaimana korupsi dapat menurunkan tingkat pertumbuhan adalah sebagai berikut. Di mana korupsi memberikan konsekuensi antara pertama, Melemahkan investasi dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi berkurang. Selain sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mauro, hasil yang didapat di dalam tulisan ini sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Tanzi dan Davodi. Tanzi dan Davodi (1997) menunjukkan bahwa berkurangnya tingkat korupsi akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain yang bertolak belakang dengan hasil dari tulisan ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan. Karena masing masing negara atau regional mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Sehingga tidak dapat disimpulkan secara mutlak bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ataupun korupsi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan.

Sebuah argumen yang lebih kuat yang dijadikan alasan mengapa korupsi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi adalah karena korupsi dipandang sebagai misalokasi sumber daya. Meski korupsi adalah transfer sumber daya, transfer yang terjadi umumnya adalah dari kegiatan produktif ke nonproduktif (pengumpulan rente), atau yang menimbulkan biaya sosial. Contohnya adalah korupsi di sektor kesehatan membuat program kesehatan di suatu negara tidak berjalan; resiko lalu lintas makin tinggi karena banyaknya pengemudi mobil harusnya tidak mendapatkan sim; atau dana pinjaman luar negeri yang justru dipakai untuk membiayai proyek-proyek yang tidak efisien. Dari analisa empiris, kita melihat bahwa korupsi berasosiasi dengan hilangnya sebagian potensi ekonomi jangka panjang. Dua negara yang memiliki karakteristik relatif sama memiliki PDB per kapita yang lebih kecil. Tapi tingkat korupsi ternyata hanya berkorelasi lemah dengan pertumbuhan perkapita sebagai ukuran untuk kinerja ekonomi jangka pendek ini bisa terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan sulit untuk mengisolasi korupsi (Wijayanto dan Ridwan, 2009).

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah melakukan langkah analisis dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, korupsi memberikan kontribusi yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penyebabnya adalah korupsi menjadikan sumber daya teralokasi secara tidak baik. Kebijakan yang seharusnya dipakai untuk pembangunan, karena adanya korupsi maka dapat bergeser dari tujuannya kepada tujuan lain di mana ada kepentingan pribadi di dalamnya. Korupsi juga berdampak kepada berkurangnya kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. Dengan berkurangnya kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, maka akan berkurang nilai manfaat dari barang dan jasa tersebut sehingga secara tidak langsung akan berdampak kepada pertumbuhan.

Kedua, dampak konsumsi pemerintah tidak dapat dirasakan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan konsumsi pemerintah bisa saja bermanfaat pada periode setelah konsumsi pemerintah itu terjadi. Misalnya konsumsi pemerintah dalam belanja modal, manfaat baru dapat dirasakan setelah proyek tersebut selesai dan dapat dipakai. Kemungkinan berikutnya adalah adanya *crowding out effect* yang berpengaruh kepada investasi sehingga akan menurunkan pendapatan nasional.

Ketiga, penerimaan pajak menurut model tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan hal tersebut dikarenakan penerimaan pajak akan digunakan untuk konsumsi pemerintah/pengeluaran pembangunan tidak pada tahun yang bersangkutan. Selain itu efektifitas penggunaan pajak juga memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama adalah peningkatan pemberantasan korupsi dapat dijadikan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan negara. Karena semakin berkurangnya korupsi

di suatu negara maka pertumbuhan akan meningkat. Tidak hanya pemberantasan korupsi saja yang perlu dilakukan. Hal hal seperti pencegahan juga sangat perlu untuk dilakukan. Negara-negara ASEAN-5 yang mempunyai indeks persepsi korupsi yang rendah dapat mencontoh Singapura dalam hal memberantas dan mencegah korupsi. Selain pemberantasan dan pencegahan korupsi, diperlukannya penyuluhan penyuluhan kepada seluruh masyarakat baik pegawai pemerintahan, masyarakat profesional, pengusaha maupun masyarakat umum (LAN, 2007).

Kedua, dengan pandangan korupsi sebagai misalokasi sumber daya, maka diperlukan pemberantasan korupsi dan pengawasan dalam pelaksanaan regulasi. Supaya kebijakan yang dibuat tidak menjadi sia-sia. Komitmen pemerintah, penegak hukum dan masyarakat akan menjalankan pemerintahan yang bersih juga perlu ditingkatkan. Bagaimanapun baiknya peraturan dibuat, jika tidak ada komitmen dalam pelaksanaannya maka peraturan tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

Ketiga, bagi peneliti lain yang ingin lebih mendalami tentang pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi, diharapkan bisa lebih dalam mengupas tentang hal lain yang mungkin berpengaruh langsung terhadap korupsi, seperti kesehatan, pendidikan dan IPM yang akhirnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga panduan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, Shochrul R, dkk. 2011. *Cara Cerdas Menguasai EViews*. Salemba Empat. Jakarta.
- Furceri, Davide dan Ricardo M. Sousa. (2009). The Impact of Government Spending on the Private Sector: Crowding-out versus Crowding-in Effects. *NIPE (Núcleo de Investigação em Políticas Económicas)*. http://www3.eeg.uminho.pt/economia/nipe/docs/2009/NIPE_WP_6_2009.pdf diakses pada 26 Januari 2013
- Gupta, Sanjeev and Davoodi, Hamid. 1998. *Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty?*. IMF Working Paper.
- Knack, Stephen and Keefer, Philip. 1995. Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests Using Alternative Institutional Indicators. *MPRA Paper*. No. 23118.
- Lambsdorff, Johann Graf. 2002. Corruption and Rent-Seeking. *Public Choice*, Vol. 113: p.97-125.
- Lambsdorff, Johann Graf. 2007. *Institutional Economics of Corruption and Reform: Theory, Evidence and Policy*. Cambridge University Press. New York.
- LAN. 2007. *Strategi Penanganan Korupsi di Negara-negara Asia Pasifik*. <http://www.pkai.lan.go.id/pdf/Strategi%20Penanganan%20Korupsi%20di%20Negara-negara%20Asia%20Pasifik.pdf>. Diakses Tanggal 8 Januari 2013.
- Mauro, Paolo. 1997. *Why Worry About Corruption*. *International Monetary Fund*. Washington, D.C.
- Mankiw, N Gregory. 2006. *Makro Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Ojede, Andrew dan Yamarik, Steven. 2012. Tax Policy and State Economic Growth: The Long-run and Short-run of It. *Economics Letters*. Vol 116:161-165.
- Svensson, Jakob. 2000. Foreign Aid and Rent-Seeking. *Journal of International Economics*. Vol. 51 : 437-461.
- Swaleheen, Mushfiq Us and Stansel, Dean. 2007. Economic Freedom, Corruption and Growth. *Cato Journal*, Vol. 27, No. 3.
- Tanzi, Vito and Davoodi, Hamid. 1997. *Corruption, Public Investment, and Growth*. IMF Working Paper.
- Todaro. Michael P and Smith, Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi edisi ke Sembilan*. Erlangga. Jakarta.
- Tullock, Gordon. 1967. The Welfare Costs of Tarriffs, Monopolies, and Theft. *Western Economic Journal*, Vol. 5, No. 3 : p.224.

Wijayanto, Zachrie Ridwan. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.